



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

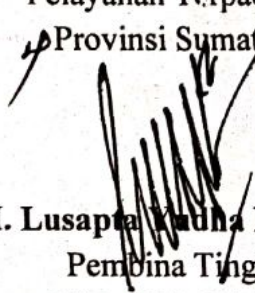
Kata Pengantar

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewa Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD 1 kali dalam 1 tahun paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berupaya menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2022 di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan ini sebagai keterangan dan bahan evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kedepan diharapkan Sumatera Selatan dapat meningkatkan nilai investasi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif serta terwujud kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang lebih efektif dan efisien.

Palembang, Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI.....	ii
1. Program dan Kegiatan APBD.....	1
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14
A. Pelaksanaan Program.....	14
B. Permasalahan dan solusi	18
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	18
A. Pelaksanaan Program.....	13
B. Permasalahan dan Solusi.....	20
4. Program Promosi Penanaman Modal.....	21
A. Pelaksanaan Program.....	21
B. Permasalahan dan Solusi.....	22
5. Program Pelayanan Penanaman Modal	23
A. Pelaksanaan Program.....	23
B. Permasalahan dan Solusi.....	25
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	27
A. Pelaksanaan Program.....	27
B. Permasalahan dan Solusi.....	28
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	29
A. Pelaksanaan Program.....	29
B. Permasalahan dan Solusi.....	29
8. PENUTUP	30



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SUMATERA SELATAN
Tahun 2022**

1. Program dan Kegiatan APBD

Pada Tahun Anggaran 2022 Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tertuang dalam 6 (*Enam*) Program dengan 13 (*tigabelas*) Kegiatan serta 39 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
i.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ii.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.	Koordinasi dan Penyusunan Perihal Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
iii.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13.	Pengadaan Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya
14.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
iv.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
v.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.	Pengadaan Mebel
22.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vi.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
vii.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
i.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
29.	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ii.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
30.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
31.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
i.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
32.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
33.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
i.	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
34.	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbaris sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
35.	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan non perizinan
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
38.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
i.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
39.	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan non perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Total Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.25.195.480.600,- (Dua Puluh lima milyarseratus Sembilan puluh lima jutaempat ratus delapanpuluhribuenam ratus Rupiah)sebelumpergeseran dan setelah pergeseran sebesar Rp 24.618.703.905,- (Duapuluhempat milyarenam ratus delapan belas jutatujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang terdiri atas :

Belanja Daerah	: Rp. 25.809.974.905
Belanja Operasi	: Rp. 24.927.637.653
Belanja Pegawai	: Rp. 17.488.079.000
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 7.439.558.653
Belanja Modal	: Rp. 882.337.252
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 105.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 453.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp. 324.337.252

10. PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Penanaman Modal masa 1 Januari s/d 31 Desember 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901 200604 1008

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan %	Realiasi			Pertimbangan Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%		
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 785.000.000	PROV. SUMSEL	3,04	100	Rp 724.337.523	92,27	100	3,04
1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem berusaha teritgrasi secara elektronik	Rp 550.000.000	PROV. SUMSEL	2,13	100	Rp 507.284.862	92,23	100	2,13
2	Penyediaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinzn non perizinan	Rp 235.000.000	PROV. SUMSEL	0,91	100	Rp 217.052.661	92,36	100	0,91
V	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.257.052.000	PROV. SUMSEL	4,87	100	Rp 1.041.686.478	82,87	100	4,87
1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 200.000.000	PROV. SUMSEL	0,77	100	Rp 177.964.461	88,98	100	0,77
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 623.525.000	PROV. SUMSEL	2,42	100	Rp 471.672.460	75,65	100	2,42
3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 433.527.000	PROV. SUMSEL	1,68	100	Rp 392.049.557	90,43	100	1,68
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI	Rp 270.000.000	PROV. SUMSEL	1,05	100	Rp 268.044.872	99,28	100	1,05
1	Pengelolaan , penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan dan non perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp 270.000.000	PROV. SUMSEL	1,05	100	Rp 268.044.872	99,23	100	1,05
	TOTAL	Rp 25.809.974.905		100	100	Rp 18.296.202.530	70,89	99,91	100

Palembang, 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Provinsi Sumatera Selatan

H. Lusapri Kurnia, SE., MM
Pejabat Tingkat I (IV/b)
NIP. 197909012006041008